

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Royke. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Puskesmas Kamonji Kota Palu. *Katalogis*. 2018;6(5):118–23. Available From: <http://jurnal.untad.ac.id>
- Agustino L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta; 2017.
- Alfian AR, Basra MU. Analisis Pelaksanaan E-Puskesmas di Puskesmas Ikur Koto Padang. *Jurnal Endurance:Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*. 2020;5(2). Available from: <http://ejournal.ildikti10.i>
- Aliyah, Y. A. nurul. (2020). Capaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi Dan Diabetes Mellitus Di Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 355–368. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1484>
- Amila, A., Sinaga, J., & Sembiring, E. (2018). Self Efficacy dan Gaya Hidup Pasien Hipertensi. *Jurnal Kesehatan*, 9(3),
- Anindya, P. A., Jati, S. P., & Nandini, N. (2020). Upaya Menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Berdasarkan Indikator Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Puskesmas Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 10(2), 30-33.
- Asep Hergantara, R. Widya Setiabudi MBA. Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Balita Di Kabupaten Bandung. 2021;4(3). <https://jurnal.unpad.ac.id>
- Awan y. Abdoellah YR. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta; 2016.
- Barlian, , Husaini, , Akbar, I. Z., Arifin, S., & Isa, M. (2021). Meta-Analysis: Relationship of Age, Gender, and Education Level with Medication Adherence of Hypertension Patients. *International Journal of Health* 20–24. <https://doi.org/10.20469/ijhms.7.30004>

- Carey, R. M., Muntner, P., Bosworth, H. B., & Whelton, P. K. (2018). Prevention and Control of Hypertension: JACC Health Promotion Series. *Journal of the American College of Cardiology*, 72(11),
- Dewi NP. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018. 2019. Available From: <http://scholar.unand.ac.id>
- Dewi NP. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018. 2019. Available From: <http://scholar.unand.ac.id>
- Erwan Agus Purwanto DRS. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media; 2015.
- Erwan Agus Purwanto DRS. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media; 2015.
- Fitri, A. S., Sariatmi, A., & Nandini, N. (2021). Penatalaksanaan Hipertensi Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru. *LINK*, 17(2), 105-112.
- Indra Saphira. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Diabetes Militus di Wilayah Puskesmas Seberang Padang Tahun 2020. Universitas Andalas; 2020. Available From: <http://scholar.unand.ac.id>
- Insani, A., Rizky, D. Z., Barus, E. K., Wulandari, F., Siagian, L. S., & Ramadhani, S. (2021). Pola Konsumsi Berisiko dan Sosio-Demografi Sebagai Faktor Resiko Penyakit Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 3(2), 73–85. <https://doi.org/10.36590/jika.v3i2.157>
- Kadji Y. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press; 2015.

Kurniawati, Chriswardani Suryawati SPA. Evaluasi Program Pengendalian Diabetes Melitus Pada Usia Produktif di Puskesmas Sapura Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2019;7(4). Available From: <https://ejournal3.undip.ac.id>

Kusuma Agung Puruhita NH. Edukasi Gizi Bagi Pasien Diabetes Mellitus Tipe2 di Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2019;1(1). Available From: <http://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id>

Laila Alif. Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi di Puskesmas Salido Tahun 2021. 2021. Available From: <http://scholar.unand.ac.id>

Laila, A. (2021). Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi Di Puskesmas Salido Tahun 2021. *Universitas Andalas*. <http://scholar.unand.ac.id/95176/>

Massi Rahmat. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Pusat Kesehatan Talise Kota Palu. *e Jurnal Katalogis*. 2016;4(4). Available From: <http://jurnal.untad.ac.id>

Maula, I. N. (2020). Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Penderita Hipertensi. *Higeia Journal Of Public Health Research* 4(Special4),799–811. [journal.unnes.ac.id/sju//article/view/34885](http://journal.unnes.ac.id/sju//article/view/34885)

Mehata, S., Shrestha, N., Mehta, R., Vaidya, A., Rawal, L. B., Bhattarai, N., & Mishra, S. R. (2018). Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Nepal: Data from nationally representative population- based cross-sectional study. *Journal of Hypertension*, 36(8),

Muchtar, F., Effendy, D. S., Lisnawaty, L., & Kohali, R. E. S. O. (2022). Edukasi

Nabila, T. (2021). Literature Review : Hipertensi Sebagai Komorbid Pada Pasien Covid-19. In *Literature Review : Hipertensi Sebagai Komorbid Pada Pasien Covid-19*.

Ningsih DS. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Sijunjung Tahun 2019. 2019.

Ningsih DS. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Sijunjung Tahun 2019. 2019.

Nugroho R. Public Policy. Jakarta: PT Alex Media Komputindo; 2018.

Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi Menggunakan Leaflet Kemenkes pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Mokoau. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 577–586.  
<https://doi.org/10.47679/ib.2022249>

Prakasita Artha Anindya1\*, Sutopo Patria Jati2, N. N. (2005). Upaya Menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Berdasarkan Indikator Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Puskesmas Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 10(2), 30–33.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jim/article/view/31375>

Purba, E. J. . (2021). *Literatur Review : Hubungan Gaya Hidup Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia*.

Rahmadani, A. N., Surjoputro, A., & Budiyanti, R. T. (2021). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penderita Diabetes Mellitus Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(2), 149-156.

Rahmi Fitria. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adapatasi Kebiasaan Baru di Objek Wisata Kota Bukit Tinggi. 2021. Available from: <http://scholar.unand.ac.id>

Ratnata, G. A. (2021). Penerapan Pedoman Penjaringan Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. *JURNAL MEDIKA USADA*, 4(2), 59-66.

- Rispawati, B. H., Purqoti, D. N., Ernawati, E., & Supriyadi, S. (2022). Upaya Penerapan Imajinasi Terbimbing Untuk Menurunkan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 1(1), 267–273. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v1i1.5505>
- Saputri SY. Analisis Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anak Air Kota Padang Tahun 2021. 2021. Available From: <http://scholar.unand.ac.id>
- Saputri SY. Analisis Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anak Air Kota Padang Tahun 2021. 2021. Available From: <http://scholar.unand.ac.id>
- Setiawan, T. A. (2021). *Kepatuhan Diet Rendah Garam Pada Penderita Hipertensi Skripsi / Laporan Tugas Akhir Hipertensi Skripsi / Laporan Tugas Akhir*.
- Shaumi, N. R. F., & Achmad, E. K. (2019). Kajian literatur: faktor risiko hipertensi pada remaja di Indonesia. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 29(2), 115-122.
- Silalahi Ulber 2004. Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. 2004;3(1):36–54. Available From: <https://journal.unpar.ac.id>
- Sumartini, N. P., Zulkifli, Z., & Adhitya, M. A. P. (2019). Pengaruh Senam Hipertensi Lansia Terhadap Tekanan Darah Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Cakranegara Kelurahan Turida Tahun 2019. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)*, 1(2), 47. <https://doi.org/10.32807/jkt.v1i2.37>
- Syafriani, Afiah, N. A. (2022). Hubungan Pengetahuan Lansia Tentang Hipertensi Dengan Upaya Pengendalian Pola Makan Diposyandu Lansia Langgini Wilayah Kerja Puskesmas Bangkinang Kota Tahun 2022. *Jurnal Doppler*, 6(1), 77–80.

Syukron, A., & Hasan, N. (2017). Perancangan Sistem Rawat Jalan Berbasis web Pada Puskesmas Winong. *Bianglala Informatika*, 3(1), 28–34.

Winarno B. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Media Pressindo; 2013.

Zahro Fatimatuz. Kanjian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penderita Diabetes Militus di Puskesmas Silo 1 dan Puskesmas Kencong Tahun 2017. Skripsi. Universitas Jember; 2017. Available From: <https://repository.unej.ac.id>

Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Guntur I KabupatenDemak. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 8(2), 165–179.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

Lampiran 1

LEMBAR PENJELASAN UNTUK RESPONDEN

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh**

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Saya **Wafika Aziza Nasir**, Mahasiswa Program Magister Administrasi Kebijakan dan Kesehatan Universitas Hasanuddin bermaksud untuk meminta data/informasi kepada Bapak/Ibu terkait dengan penelitian tesis saya dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi Puskesmas Marusu Kabupaten Maros**”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan standar pelayanan minimal di wilayah kerja Puskesmas Marusu Kabupaten. Penelitian ini bersifat sukarela. Saya selaku peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu jika bersedia menjadi responden, sehingga saya sangat berharap Bapak/Ibu menjawab pernyataan dengan jujur tanpa keraguan. Jika Bapak/Ibu ingin jawaban yang diberikan tidak diketahui orang lain, maka wawancara singkat bisa dilakukan secara tertutup.

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat responden ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya: sakit atau ada keperluan lain yang mendesak) maka responden dapat mengungkapkan langsung kepada peneliti. Hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi saya (**Wafika Aziza Nasir/0853-9525-3689**).

Maros, 30 Juli 2023

Peneliti,

**Wafika Aziza Nasir, SKM**

(No. Hp 0853-9525-3689)



Lampiran 2

Informed Consent  
PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN

Penelitian ini mengenai “Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi di Wilayah Puskesmas Marusu”

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Alamat ;  
No Telpon :

Semua penjelasan terkait maksud dan tujuan penelitian ini telah disampaikan oleh peneliti. Dengan ini, saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wafika Aziza Nasir (K052212004) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Wawancara yang dilakukan akan direkam melalui handphone.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa pemaksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, Juli 2023

Partisipan

( )

**Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit  
Hipertensi di Puskesmas Marusu Kabupaten Maros**

**A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Umur :

Jabatan : Kepala Puskesmas Marusu, PJ PTM Puskesmas  
Marusu, dan Petugas Pelaksana Program

Pendidikan terakhir :

Kode Informan :

Tanggal wawancara :

**B. PERTANYAAN**

**1. Komunikasi**

**a. Transmisi**

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan SPM Hipertensi yaitu  
PP No 2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 2019 ?  
Apakah melalui rapat atau kegiatan sosialisasi?  
Kapan diadakan?  
Dimana diadakan?  
Pembahasannya mengenai apa ?

### **b. Kejelasan**

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang SPM Hipertensi dan Petunjuk Teknis Pelaksanaanya ? (PP Nomor 2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 2019 tentang Juknis Pelaksanaan SPM )

Apa itu SPM Hipertensi ?

Apa isi dari kebijakan tersebut?

## **2. Sumber Daya**

### **a. Staf**

- 1) Berapa jumlah staf di puskesmas ? dan Berapa orang staf atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi di Puskesmas?

Bagaimana menurut Bapak/Ibuk mengenai jumlah staf dalam pelaksanaan SPM Hipertensi di Puskesmas ?

Apakah jumlah staf tersebut sudah cukup?

Jika kurang SDM bagian apa yang kurang?

### **b. Fasilitas**

- 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ?
- 2) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai dana dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ini ?

### **3. Disposisi**

#### **a. Sikap**

1) Bagaimanakah respon Bapak/Ibu dalam melaksanakan standar pelayanan minimal hipertensi?

Apakah Bapak/Ibu melaksanakan kebijakan ini dengan komitmen yang tinggi?

#### **b. Intensif**

1) Apakah Bapak/Ibu mendapatkan insentif ketika melaksanakan kebijakan SPM Hipertensi ?

### **4. Struktur Birokrasi**

#### **a. SOP**

1) Apakah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Implementasi kebijakan SPM Hipertensi ?

#### **b. Fragmentasi**

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ?

**Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit  
Hipertensi di Puskesmas Marusu Kabupaten Maros**

**A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Umur :

Jabatan : Kabid P2PTM dan staf PTM

Pendidikan terakhir :

Kode Informan :

Tanggal wawancara :

**B. PERTANYAAN**

**1. Komunikasi**

**a. Transmisi**

1) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan SPM Hipertensi yaitu PP No 2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 2019?

Apakah melalui rapat atau kegiatan sosialisasi?

Siapa yang mengadakan?

Kapan diadakan?

Dimana diadakan ?

Pembahasannya mengenai apa ?

2) Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan kebijakan tersebut kepada puskesmas di wilayah kerja Dinkes Maros?

### **b. Kejelasan**

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang SPM Hipertensi dan Petunjuk Teknis Pelaksanaanya ? (PP Nomor 2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 2019)  
  
Apa itu SPM Hipertensi ?  
  
Apa isi dari kebijakan tersebut?

## **2. Sumber Daya**

### **a. Staf**

- 1) Berapa jumlah staf pada bidang P2P?  
  
Berapa jumlah staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPM Hipertensi?  
  
Apakah jumlah staf tersebut sudah cukup?

### **b. Fasilitas**

- 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ?  
  
Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di Dinkes?  
  
Apakah sarana dan prasarana sudah cukup ?
- 2) Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai mengenai dana dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ini?

### **3. Disposisi**

#### **a. Sikap**

- 1) Bagaimanakah respon Bapak/Ibu dalam melaksanakan kebijakan SPM Hipertensi tersebut?

#### **b. Intensif**

- 1) Apakah Bapak/Ibu pelaksana kebijakan SPM Hipertensi di Dinkes mendapatkan insentif ?

### **4. Struktur Birokrasi**

#### **a. SOP**

- 1) Apakah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Implementasi kebijakan SPM Hipertensi ?

#### **b. Fragmentasi**

- 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ?

**Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit  
Hipertensi di Puskesmas Marusu Kabupaten Maros**

**A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :  
Umur :  
Jabatan : Pasien Hipertensi  
Pendidikan terakhir :  
Kode Informan :  
Tanggal wawancara :

**B. PERTANYAAN**

**1. Komunikasi**

**a. Transmisi**

- 1) Apakah pernah petugas puskesmas datang ke rumah atau kampung Bapak/Ibu untuk memberitahu tentang penyakit hipertensi?  
jika pernah kapan?  
Apa yang disampaikan?

**b. Kejelasan**

- 1) Apakah Bapak/Ibu memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak/Ibu petugas puskesmas?
- 2) Apakah petugas puskesmas menjelaskan pemeriksaan apa yang harus Bapak/Ibu lakukan untuk mengetahui apakah memiliki kemungkinan menderita penyakit Hipertensi?



## **2. Sumber Daya**

### **a. Staf**

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai petugas di Puskesmas?

Apakah bapak/ibu merasa cukup dengan jumlah dokter ataupun tenaga puskesmas ketika berobat?

Apakah pernah ketika berobat tidak ada dokter atau tenaga kesehatan di puskesmasn?

### **b. Fasilitas**

1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ?

Lampiran 3

**MATRIKS HASIL WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF ANALISIS IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYAKIT HIPERTENSI DI PUSKESMAS  
MARUSU KABUPATEN MAROS TAHUN 2023**

1. Komunikasi

a. Transmisi

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui kebijakan SPM Hipertensi yaitu PP No 2 Tahun 2018 dan PMK No 4 Tahun 2019?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	“Iya tau, semuanya dari rapat, dari sosialisasi, ee.. dari workshop dan lain-lain.. eee yang mengadakan dari pusat, dari provinsi kabupaten sendiri.. biasanya diadakan kadang daring, kadang juga disini” (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinkes Kab. Maros).	Pesan kebijakan melalui berapa tingkatan birokrasi menuju implementor sehingga penyaluran komunikasi yang baik akan mencegah	Transmisi kebijakan mengenai SPM Hipertensi telah ditransmisikan secara internal berdasarkan hierarkinya namun transmisi kebijakan secara eksternal terhadap sasaran belum di dilakukan dengan baik oleh Puskesmas Marusu
2.	“Kalau peraturan ini biasanya dari rapat atau workshop yang diadakan dari pusat, ee kalau ada yang belum saya pahami, biasa saya tanyakan ke penanggung jawab atau lihat pedoman” (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinkes Kab. Maros).	terjadinya kesalah pahaman dalam penyampaian pesan kebijakan sehingga dapat dihasilkan implementasi kebijakan yang baik	
3.	“Melalui rapat pertemuan yang diadakan sama Dinas Kesehatan” (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).	(Agustiono, 2017). Oleh sebab itu kebijakan SPM	

4.	“Dari rapat sama pedoman yang di kasih dari Dinkes” (NFA, 49 Thn, Penanggung Jawab Program PTM di Puskesmas Marusu)	Hipertensi harus sampai kepada seluruh implementor secara berjenjang dan termasuk sasaran dari kebijakan tersebut	
5.	“Melalui rapat, diadakan di Dinkes oleh PJ PPT dua kali dalam setahun” (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).		

2) Bagaimana cara implementor mentransmisikan kebijakan SPM yang terdapat dalam PMK Nomor 4 Tahun 2019?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	“Disampaikan ke puskesmas juga kadang rapat, kadang juga sosialisasi, melalui grub WA juga.” (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinkes Kab. Maros).	Pemerintah dapat mentransmisikan informasi terkait kebijakan dengan menggunakan sarana yang disebut komunikasi pemerintah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu internal dan eksternal. Transmisi kebijakan secara internal dilakukan oleh pemerintah di dalam lingkungan organisasinya baik secara vertikal atau orizontal pada struktur birokrasi	Sosialisasi dilakukan melalui rapat pertemuan, daring melalui grub whatsapp, enerusan informasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Puskesmas marusu ke masyarakat.
2.	“Kalau peraturan ini biasanya dari rapat” LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinkes Kab. Maros).		
3.	“Penyampaiannya melalui rapat pertemuan SPM setiap bulan ” (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).		
4.	“Melalui rapat. Disampaikan sama kapus” (NFA, 49 Thn, Penanggung Jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).		
5.	“Melalui rapat pertemuan” (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).		

6	“Kalau di rumah tidak pernah ada sosialisasi dari puskesmas, biasa langsung ja ke puskesmas.. ee di puskesmas pi baru dikasih tau ”(RSM, 42 Thn, Pasien hipertensi)		
---	---	--	--

b. Kejelasan

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui SPM Hipertensi dan petunjuk teknis pelaksanaannya (PMK Nomor 4 Tahun 2019) ?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	“Terkait SPM yang wajib dilakukan di daerah. Untuk targetnya harus 100%, jadi semua 12 indikator itu harus 100%.(RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan kab. Maros).	Suatu kebijakan disampaikan secara jelas kepada implementor apabila informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi mengenai tujuan, sasaran, dan arah pelaksanaan kebijakan dibutuhkan oleh implementor untuk mengerahkan pelaksanaan	Informasi mengenai kebijakan SPM DM belum dipahami secara menyeluruh oleh implementor. Pasien Hipertensi di Puskesmas Marusu sudah mengetahui apa itu penyakit Hipertensi
2.	“SPM Hipertensi itu kita lakukan scrining ke penderita Hipertensi dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah, seluruh SPM 100%, kalau ada apa ee... penderita hipertensi di puskesmas atau wilayah kerja puskesmas itu. Contohnya itu apa... puskesmas yang kau ambill Marusu, katakanlah 50 orang, jadi 50 orang itu harus kita scrining, harus kita lakukan pemeriksaan berkala melalui pemeriksaan tekanan darah” (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinkes Kab. Maros).		

3.	<p>“SPM itu...artinya wajib terlaksana, jadi capaiannya harus 100%. Tujuan ee... adanya SPM ini menyelamatkan masyarakat, ada beberapa penyakit yang harus ditangani termasuk penyakit Hipertensi”(ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).</p>	<p>kebijakan tersebut sesuai dengan hasil akhir yang ingin dicapai sesuai dengan konten kebijakan.</p>	
4.	<p>“SPM hipertensi itu pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurung waktu satu tahun, isi kebijakannya itu tentang pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Ini mi bagusnya dikeluarkan kebijakan karna memberikan kemudahan untuk pemerintah daerah dalam penyusun perencanaan pelaksanaan SPM ini”(NFA, 49 Thn, Penanggung Jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).</p>		
5.	<p>“Kalau pedoman ada, tapi isi kebijakannya ndakutau” (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu”</p>		
6	<p>“Hipertensi itu ee.. Darah tinggi (RSM, 42 Thn, Pasien Hipertensi).</p>		

## 2. Sumber Daya

### a. Staf

#### 1) Berapa jumlah staf pelaksana kebijakan SPM Hipertensi ?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	“Untuk SDM nya.. termasuk saya sebagai kabid hanya 2 orang, kalau SDM nya bisa di bilang itu sangat kurang”(RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros).	SDM menjadi sumber daya utama dalam implementasi kebijakan sehingga mereka harus kompeten, terampil, dan memiliki kemauan dalam melaksanakan tugas yang ditujukan oleh kebijakan tersebut (Awan, 2016). Nugroho (2018) menyebutkan bahwa keterbatasan pembuat kebijakan ialah mereka kurang memperhatikan kemampuan sumber daya manusia sehingga banyak kebijakan publik yang baik namun, akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.	Implementor kebijakan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros berjumlah 2 orang dan Puskesmas Marusu berjumlah 4 orang, namun masih perlu dilakukan penilaian beban kerja terhadap penanggung jawab program karena memiliki beban kerja yang ganda dimana bertanggung jawab terhadap beberapa program sehingga pelaksanaan program kurang maksimal
2.	“Tidak cukup” (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros)		
3.	“Bagian penanganan SPM penanggung jawabnya 1, coba nanti tanyakan ke bidan uci sebagai penanggung jawab SPM, ku lupa i brp anggotanya. Kalau nda salah 2 atau 3 orang. Langsung mi tanya ke penanggung jawabnya biar lebih jelas” (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).		
4.	“Untuk SDM yang bertanggung jawab pelaksanaan SPM 1 orang penanggung jawab 3 orang anggota, itu saja masih kurang karna sasarannya 4999”(NFA, 49 Th, Penanggung jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).		
5.	“Masih kurang, karna kita disini. Saya saja sebagai pelaksana bukan hanya hipertensi, tapi saya merangkap juga ke DM, ODGJ, sama bagian pencatatan” (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).		

b. Fasilitas

1) Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	"Kalau apa namanya..klo hipertensi kan butuh hanya ee.. tensi meter, stetoskop juga ada, sama obat-obatan. Tapi kan kalau untuk di Dinkes untuk sarana dan prasarana itu tidak ada masalah, karna pelaksanaan SPM itu bukan di Dinkes, pelaksanaan SPM kan di Puskesmas. Kalau di Dinkes hanya manajemen. Jadi hanya butuh komputer, printer, kertas" (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros).	Fasilitas fisik menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor bisa jadi telah memiliki staf yang mencukupi, paham dengan apa yang dilakukan dan memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya, namun apabila tidak terdapat fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (Erwan, 2015).	Fasilitas di Puskesmas Maros yang berhubungan dengan pelaksanaan SPM Hipertensi sudah memadai, terdapat beberapa perlengkapan dan peralatan seperti tensi meter, timbangan berat badan, dan alat cek gula darah.
2.	"Untuk sarana dan prasarana di dinkes sudah cukup" (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros)		
3.	"Peralatan pengecekan ee.. hipertensi itu tentu alatnya hanya tensi meter, timbangan berat badan ee.. itu saja kalau pemeriksaan hipertensi. Itu juga biasa kalau skrining sepaket ki. Ada pengecekan kolestrol, asam urat" (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).		
4.	"Klo alatnya cukup ji, kayak itu alat tensi meter, timbangan berat badan dan lain-lain		

	lengkap semua jenis" (NFA, 49 Th, Penanggung jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).		
5.	"Eee... tensi meter, timbangan berat badan, lingkar perut sama alat untuk periksa gula darah, kolesterol dan asam urat. Pemeriksaan paket lengkap itu dilakukan setiap bulan. Karena itu diharuskan" (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).		
6.	"Fasilitas bagaimana, kalau berobat lengkapnya peralatan dokternya" (RSM, 42 Thn, Pasien Hipertensi).		

2) Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai mengenai dana dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi ini?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	"Seharusnya untuk SPM itu kan kewajiban daerah untuk membiayai, tapi itu sangat terbatas jadi kita biasanya berharap dari DAK atau BOK" (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros).	Tanpa adanya anggaran maka berbagai program yang telah disusun untuk	Jumlah dana BOK untuk kegiatan SPM Hipertensi dirasa belum mencukupi. Dana untuk pelaksanaan program ini sangat
2.	"Di kabupaten tidak begitu memadai atau tidak cukup anggarannya. anggaran ini berasal dari dana BOK dananya dari pusat. Eee Sementara kemarin setelah pandemi arah kebijakan penggunaan dana BOK tidak berdasarkan keseluruhan kepada SPM, tapi ada pengalihan dananya ke penuntasan	mengimplementasikan kebijakan tidak akan berjalan untuk mencapai tujuannya dana memegang peran yang sangat penting dalam	mempengaruhi capaian target SPM di Puskesmas Marusu



	covid" (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros).	pelaksanaan program tanpa dana suatu program tidak akan berlangsung.	
3.	"Ada, dana BOK untuk jumlah tidak tahu pasti berapa, kayaknya itu belum cukup untuk melakukan program SPM di puskesmas"(ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).		
4.	"Dana itu di biyai BOK sebagai ee.. perjalanan dinas, perjalanan dinas untuk kunjungan skrining, transportasi itu. Itu saja tidak cukup karena belum termasuk uang makan, dana itu sangat berpengaruh karna dalam melaksanakan program kalau dananya sedikit, misalnya kita dalam sebulan itu jalan ke 11 wilayah yang ada ee tapi karna dananya sedikit kita cuman bisa jalan 5 atau 6 wilayah. Jadi dana itu berpengaruh terhadap capaian target" (NFA, 49 Th, Penanggung jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).		
5.	"Melalui dana BOK, yahh.. belum cukup" (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).		

### 3. Disposisi

#### a. Sikap

1) Bagaimanakah respon Bapak/Ibu dalam melaksanakan kebijakan standar pelayanan minimal penyakit Hipertensi ?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	"Yah SPM ini kan kewajiban. ada sangsi kepada kepala daerah yang tidak bisa memenuhi SPM ini...kita memaksimalkan SDM dan anggaran yang tersedia" (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros).	Implementor harus memiliki kemauan dan dedikasi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Antusias pada pelaksanaan kebijakan akan diperlihatkan oleh implementor yang mau menjalankan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan. (Erwan, 2015).	Implementor terkendal pada SDM yang terbatas dan beban kerja ganda yang dilaksanakan sehingga mereka kesulitan dalam bekerja secara maksimal.
2.	"Wajib lah, tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan ya, semampu kita" (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros).		
3.	"Ini kan standar pelayanan minimal, wajib didapatkan dalam masyarakat capaiannya aja 100% berartikan sempurna" (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).		
4.	"Iya harus lah.. kan kita di puskesmas ini kan tiang utamanya edukasi sama preventif" (NFA, 49 Thn, Penanggung jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).		
5.	"Yah ... Semampu ta saja, karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita disini sebagai pelaksana" (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).		

b. Intensif

1) Apakah Bapak/Ibu mendapatkan insentif ketika melaksanakan kebijakan SPM Hipertensi?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	<p>“Kalau untuk intensif tidak adaa, ee.. paling perjalanan dinas”</p> <p>(RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros).</p>	<p>Implementor yang cenderung tidak mendukung kebijakan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Salah satu cara untuk mengatasinya menurut George C. Edward III ialah dengan melakukan manipulasi insentif yang dapat mendorong implementor melaksanakan kebijakan dengan baik.</p>	<p>Implementator tidak mendapatkan insentif khusus dalam pelaksanaan SPM Hipertensi. Implementor hanya menerima gaji yang memang dibayarkan setiap bulannya oleh pemerintah.</p>
2.	<p>“Tidak ada, Cuma uang perjalanan dinas luar”</p> <p>(LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros).</p>		
3.	<p>“Tidak ada insentif khusus ya, palingan kalau ke lapangan yah dikasih uang perjalananan dinas ji, kalau diluar itu tidak ada”</p> <p>(ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).</p>		
4.	<p>“Tidak ada, kalau melaksanakan kegiatan SPM ini kan ada namanya uang perjalanan, jadi hanya sebatas uang perjalanan dinas”</p> <p>(NFA, 49 Thn, Penanggung jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).</p>		
5.	<p>“Ndada kalau insentif. Hanya dalam bentuk gaji”</p> <p>(PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).</p>		

#### 4. Struktur Birokrasi

##### a. SOP

- 1) Apakah terdapat SOP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan implementasi kebijakan SPM Hipertensi?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	“SOP ada, di puskesmas juga ada.. kalau untuk ee.. sejalan dengan PMK iya sejalan” (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros).	Aspek struktur organisasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah SOP yang menciptakan kondisi kondusif dan terkoordinasi. Penyeragaman tindakan dalam melaksanakan kebijakan dapat dibantu dengan menggunakan SOP, sehingga menghindari pemborosan dan ketidak efisienan yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Winarno, 2013) .	Implementator telah memiliki SOP dalam pelaksanaan SPM hipertensi yang berisikan tentang penatalaksanaan dan pelaksanaan program SPM Hipertensi di puskesmas yang merujuk pada PMK No.4 Tahun 2019.
2.	“Untuk SOP ada, kita disini masing-masing beda job, kalau disini ke arah kebijakan sebagai konseptor di dinas kesehatan tentang penatalaksanaan SPM, kalau pelayanannya lebih banyak di puskesmas SOP nya. Kalau di dinkes konsepnya hanya tatanan administrasi” (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros).		
3.	“Ada, sama pemegang programnya di bidan uci, karna setiap kegiatan itu punya SOP, tidak ada yang tidak punya SOP dalam pelaksanaan program” (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).		
4.	“SOP nya ada. Semua kegiatan ada SOPnya” (NFA, 49 Thn, Penanggung jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).		
5.	“Kalau SOP ada” (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).		

b. Fragmentasi

- 1) Bagaimana pembagian tugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan SPM Hipertensi?

No.	Emik	Etik	Kesimpulan
1.	"Bidang yang terkait dalam pelaksanaan SPM ini bidang saya sendiri P2PTM dan Keswa, terkait dalam pelaksanaann SPM...SK ada, kita disetiap bidang di buatkan SK" (RSN, 45 Thn, Kabid P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Maros).	Fragmentasi bertujuan untuk membagi tanggung jawab setiap implementor yang di	implementor di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dan Puskesmas Marusu telah terfragmentasikan
2.	"Ada kabid, saya sebagai PJ untuk SPM dan dibantu 1 orang sukarela, SK PJ SPM ada yang dikeluarkan dari perencanaan" (LNA, 38 Thn, Penanggung Jawab PTM Dinas Kab. Maros).	sesuaikan dengan bidangnya. Struktur birokrasi yang terfragmentasi akan	secara jelas dan bertanggung jawab secara maksimal terhadap tugas dan
3.	"SPM Hipertensi ini di bawah tanggung jawab program PTM ada Bidan uci sebagai penanggung jawabnya...SK ada" (ISK, 39 Thn, Kepala Puskesmas Marusu).	menciptakan implementasi kebijakan yang lebih efektif karena	masing-masing.
4.	"Yang bertanggung jawab dalam program SPM ini saya, ibu patimah sebagai perawat dan dokter, kalai penaggung jawab besar seluruh program ya kapus. Ya ada SKnya" (NFA, 49 Thn, Penanggung jawab Program PTM di Puskesmas Marusu).	dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten sebab fragmentasi yang tidak baik akan	
5.	"Kan PJ PTM itu Bidan uci, saya sebagai pelaksana saja, SK ada dari kapus" (PTA, 27 Thn, Pelaksana PTM di Puskesmas Marusu).	berdampak dalam proses implementasi kebijakan (Agustino, 2019).	

## Lampiran 4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658  
E-mail : [fm.unhas@gmail.com](mailto:fm.unhas@gmail.com), website : <https://fm.unhas.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Nomor : 11942/UN4.14/TD.06/2022

tentang  
PENGANGKATAN PANITIA PENILAI SEMINAR USUL, HASIL, DAN UJIAN AKHIR MAGISTER  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN  
A.N. WAFIKA AZIZA NASIR NOMOR POKOK: K052212004  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

- DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
- Membaca : Surat Usulan Ketua Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Nomor: 11941/UN4.14/OTD.06/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Usulan Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. WAFIKA AZIZA NASIR Nomor Pokok : K052212004
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. WAFIKA AZIZA NASIR Nomor Pokok : K052212004, mahasiswa Program Magister Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Program Pascasarjana Unhas, dipandang perlu mengangkat Panitia Penilai
- Meringkat : b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1955, tentang Pendidikan Universitas Hasanuddin (LN 1955 No. 39)
  4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
  7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UNA/OT.04/2015 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
  8. Peraturan Rektor Unhas No. 2754/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin
  9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3075/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembukaan Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Program Magister (S2) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil, dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. WAFIKA AZIZA NASIR Nomor Pokok : K052212004, Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:
- Pertama :
- |   |            |
|---|------------|
| 1. Prof. Sukri Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc.PH., Ph. D | Ketua      |
| 2. Dr. H. Muhammad Alwy Arifin, M. Kes.                   | Sekretaris |
| 3. Dr. Balqis, SKM., M. Kes., M. Sc.PH                    | Anggota    |
| 4. Dr. Wahiduddin, SKM., M. Kes                           | Anggota    |
| 5. Prof. Dr. Anwar Daud, SKM., M. Kes                     | Anggota    |
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sehubungan dengan keputusan ini diterbitkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022  
Dekan

Prof. Sukri Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc., Ph. D  
NIP. 197205292001121001

- Tembusan Kepada Yth :
1. Para Wakil Dekan FKM-UNHAS
  2. Ketua Program Studi S2 AKK FKM-UNHAS
  3. sdr. WAFIKA AZIZA NASIR
  4. Bertinggal

# Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658  
E-mail : [fm.unhas@gmail.com](mailto:fm.unhas@gmail.com), website : <https://fm.unhas.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Nomor : 11942/UN4.14/TD.06/2022

tentang  
PENGANGKATAN PANITIA PENILAI SEMINAR USUL, HASIL, DAN UJIAN AKHIR MAGISTER  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBLIJAKAN KESEHATAN  
A.N. WAFIKA AZIZA NASIR NOMOR POKOK: K052212004  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Usulan Ketua Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Nomor: 11941/UN4.14/S/TD.06/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Usulan Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. WAFIKA AZIZA NASIR Nomor Pokok : K052212004
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. WAFIKA AZIZA NASIR Nomor Pokok : K052212004, mahasiswa Program Magister Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Program Pascasarjana Unhas, dipandang perlu mengangkat Panitia Penilai
- Meringkat : b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendidikan Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)
  4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
  7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
  8. Peraturan Rektor Unhas No. 2754/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin
  9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3675/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembukaan Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Program Magister (S2) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil, dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. WAFIKA AZIZA NASIR Nomor Pokok : K052212004, Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:
- |   |            |
|---|------------|
| 1. Prof. Sukri Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc, Ph. D | Ketua      |
| 2. Dr. H. Muhammad Alwy Arifin, M. Kes                | Sekretaris |
| 3. Dr. Baiqis, SKM., M. Kes., M. Sc, Ph               | Anggota    |
| 4. Dr. Wahiduddin, SKM., M. Kes                       | Anggota    |
| 5. Prof. Dr. Anwar Daud, SKM., M. Kes                 | Anggota    |
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022  
Dekan

Prof. Sukri Palutturi, SKM., M. Kes., M. Sc., Ph. D  
NIP. 197205292001121001

- Tembusan Kepada Yth :
1. Para Wakil Dekan FKM-UNHAS
  2. Ketua Program Studi S2 AKK FKM-UNHAS
  3. sdr. WAFIKA AZIZA NASIR
  4. Bertinggal

## Lampiran 6

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 503658  
E-mail : [fas.kemkes@uii.ac.id](mailto:fas.kemkes@uii.ac.id), website : [www.fkm.unhas.ac.id](http://www.fkm.unhas.ac.id)

---

No : 13242/UN4.14/PT.01/04/2022 4 November 2022  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data Awal

YB:  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama	Wafika Azza Nasir
Nomor Pokok	K062213004
Program Studi	Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Bermaksud melakukan pengambilan data mengenai "Hipertensi", data tersebut akan digunakan untuk penyusunan proposal tesis dengan judul "Analisis Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penyakit Hipertensi di puskesmas Maros".

Selubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
↓ Dekan

Prof. Sukri Paluturi, SKM, M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D  
NIP. 19720529 200112 1 001

Tembusan:  
1. Para Wakil Dekan FKM Unhas  
2. Arsip





## Lampiran 7



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Bugenville No. 1, Komplek Pakantoran Bupati Maros Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90510  
Telp dan Faks (0411) 8838277 email : kesehatan@maroskab.go.id Website : www.kesehatanmaroskab.go.id

---

15 November 2022.

Nomor : 440/ 7071 / Dinkes  
Lampiran : -  
Perihal : *Pengambilan Data Awal*

Kepada  
Yth. Kepala UPTD Puskesmas  
Lingkup Kabupaten Maros  
Masing-masing  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Nomor 13242/LN/4.14/PT.01.04/2022 Tanggal 04 November 2022 Perihal Pengambilan Data Awal, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Puskesmas agar memfasilitasi kegiatan tersebut dengan identitas mahasiswa sebagai berikut :

N a m a : **WAFIKA AZIZA NASIR**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Pokok : K052212004  
Program Studi : Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah pengambilan data mengenai "Hipertensi" dan data tersebut akan digunakan untuk penyusunan proposal tesis dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYAKIT HIPERTENSI DI PUSKESMAS MAROS"

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAROS**



**dr. H. MUHAMMAD YUNUS, S.Ked, M.Kes**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197607092007011011

Tembusan :

1. Bupati Maros di Maros sebagai Laporan.
2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas di Makassar;
3. Kepala BKPSDM di Maros.
4. Mahasiswa Yang bersangkutan, dan
5. Arsip.

## Lampiran 8

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
*Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585638*  
*E-mail : fkm.unhas@gmail.com, website : http://fkm.unhas.ac.id*

---

No : 1896 /UN4.14/PT.01.04/2023  
Lamp : Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

7 Februari 2023

Yth.  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**  
Di –  
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Wafika Aziza Nasir**  
Nomor Pokok : **K052212004**  
Program Studi : **Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul  
**"Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyakit Hipertensi di Puskesmas Maroso Kabupaten Maros"**.

Pembimbing : 1. Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D (Ketua)  
2. Dr. H. Muhammad Aley Anfin, M.Kes (Anggota)

Lokasi Penelitian : **Puskesmas Maroso Kabupaten Maros**  
Waktu Penelitian : Februari – April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,

  
**Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, M.Sc.PH, Ph.D**  
NIP. 19720529 200112 1 001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FKM Unhas
2. Peringgal



## Lampiran 9

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 2427/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Maros
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor : 1896/UN4.14/PT.01.04/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: WAFIKA AZIZA NASIR
Nomor Pokok	: K052212004
Program Studi	: Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYAKIT HIPERTENSI DI PUSKESMAS MARUSU KABUPATEN MAROS "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Februari s/d 20 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 10 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	<b>Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.</b> Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19830424 198903 1 010
---	---

Tambahan Yth

1. Dekan Fak. kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

## Lampiran 10



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jendral Sudirman No. 1 Telp. (0411) 27 2884 Kabupaten Maros  
Email : [pdmp@pdmp.moroskab.go.id](mailto:pdmp@pdmp.moroskab.go.id) Website : [www.dinaspp.dmaroskab.go.id](http://www.dinaspp.dmaroskab.go.id)

---

**IZIN PENELITIAN**  
Nomor: 83/II/IP/DPMP/TSP/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Perawatan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 90/II/REK-IP/DPMP/TSP/2023

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : WAFIKA AZIZA NASHIR  
Nomor Pokok : K052213004  
Tempat/Tgl.Lahir : CEMPAGA / 17 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat : JALAN ABDULLAH DG. SORJA Pk 23 ALLA - ALLA MAKASSAR  
Tempat Meneliti : 1. PUSKESMAS MARUSU , 2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penelitian Tesis dengan Judul :

**"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYAKIT HIPERTENSI DI PUSKESMAS MARUSU KABUPATEN MAROS "**

Waktunya Penelitian : 20 Februari 2023 s/d 20 April 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyediakan 1 ( satu ) sampel Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 14 Februari 2023

**KEPALA DINAS,**  
  
**ANDI ROSMAN, S. Soc, MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip : 19721108 199202 1 001



Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar
2. Arsip

	<b>PENANGANAN HIPERTENSI</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tgl. Terbit :	
Halaman : 1 / 4 halaman			
UPT Puskesmas MARUSU			<u>Iskandar M., S.Farm,Apt</u> NIP.19841209 201101 1 006
Pengertian	Hipertensi adalah kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari $\geq 140$ mmHg dan atau diastolik $\geq 90$ mmHg.		
Tujuan	Sebagai acuan Penerapan langkah-langkah untuk pengobatan hipertensi.		
Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Marusu no..... tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Puskesmas Marusu		
Referensi	Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lakukan anamnesa</li> <li>2) Lakukan pemeriksaan fisik</li> <li>3) Lakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>4) Diagnose klinis : berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li> <li>5) Rencana penatalaksanaan komprehensif ( Plan )</li> </ol> <p><b>Anamnesa ( Subjective)</b></p> <p><u>Keluhan</u> Keluhan hipertensi antara lain : sakit/nyeri kepala, gelisah, jantung berdebardebar, pusing, leher kaku, penglihatan kabur, dan rasa sakit di dada. Keluhan tidak spesifik antara lain tidak nyaman kepala, mudah lelah dan impotensi.</p> <p><u>Faktor Risiko</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hal yang tidak dapat dimodifikasi : umur, jenis kelamin, riwayat hipertensi dan penyakit kardiovaskular dalam keluarga.</li> <li>2. Hal yang dapat dimodifikasi : pola makan, konsumsi alkohol berlebihan, aktifitas fisik kurang, merokok, obesitas, dislipidemia, diabetes melitus, psikosial dan stres.</li> </ol>		



## Lampiran 11

## DOKUMENTASI



## Lampiran 12

### DAFTAR RIWAYAR HIDUP



#### A. Identitas Diri

Nama : Wafika Aziza Nasir  
Stambuk : 14120170043  
Agama : Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Cempaka, 17 September 2000  
Alamat : Desa Lolak, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, SULUT.

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Ayong, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Lulus Tahun 2011.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Lulus pada tahun 2014.
3. Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Manado Jl. Hasanuddin 14, Islam, Tuminting Kota Manado, Sulawesi Utara. Lulus tahun 2017.
4. Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Perguruan Tinggi Swasta, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi Kesehatan Masyarakat.